panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

LAPORAN HASIL EVALUASI

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik



INDEKS SPBE TAHUN 2021

PEMERINTAH KAB. LUWU

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa kegiatan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2021 telah dilaksanakan dengan baik dan lancar. Pelaksanaan kegiatan evaluasi SPBE bertujuan untuk mengukur capaian kemajuan penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, meningkatkan kualitas penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Harapan kami, hasil evaluasi SPBE tahun 2021 dapat digunakan sebagai pedoman oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan SPBE yang terpadu sehingga dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas, terintegrasi, berkesinambungan, dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bagi aparatur sipil negara instansi pusat dan pemerintah daerah, serta bermanfaat bagi pelaku usaha dan masyarakat luas.

Kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang baik antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan semua pemangku kepentingan termasuk Kementerian Lembaga anggota Tim Koordinasi SPBE Nasional, Tim Asesor Eksternal Perguruan Tinggi, Instansi Pusat, dan Pemerintah Daerah.

Jakarta, 29 Desember 2021

Deputi Bidang Kelembagaan
dan Tata Laksana,



Rini Widyantini

EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2021

Ringkasan Eksekutif

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Pelaksanaan Evaluasi SPBE dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali untuk dapat memastikan pertumbuhan penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Evaluasi SPBE menghasilkan indeks yang diperoleh secara inkremental, yakni akan terus dilakukan pemutakhiran dari proses peningkatan hasil penilaian dan populasi dalam pelaksanaannya, sehingga memastikan progres kemajuan penerapan SPBE.

Pada tahun 2021, pelaksanaan Evaluasi SPBE telah dilaksanakan dengan menggunakan instrumen yang telah disesuaikan, dari yang sebelumnya 37 indikator menjadi 47 indikator, dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Penyesuaian atas instrumen dilakukan untuk memastikan peningkatan kualitas SPBE dapat tercapai sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dengan diterapkannya instrumen baru ini tentunya terdapat penyesuaian dalam penilaian yang berdampak pada penurunan nilai indeks SPBE di hampir seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah terutama pada indikator-indikator baru yang dinilai pada tahun ini. Namun hal ini ditargetkan untuk memenuhi cakupan yang lebih komprehensif, dimana hasil penilaian tahun ini merepresentasikan indeks penerapan SPBE dengan kualitas yang lebih optimal.

Hasil pelaksanaan Evaluasi SPBE yang dilakukan pada tahun 2021 ini akan menjadi *baseline* kondisi penerapan dengan kesesuaian kriteria dan kondisi yang harus dipenuhi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Untuk itu diharapkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SPBE setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat digunakan dalam menentukan strategi tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah di masa mendatang dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat dan terwujudnya digitalisasi pemerintah dalam kerangka reformasi birokrasi nasional.

Dasar Hukum

- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 962 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Metodologi Evaluasi SPBE

Penerapan SPBE dinilai dengan metode tingkat kematangan SPBE yang merupakan kerangka kerja untuk mengukur derajat kematangan penerapan SPBE yang ditinjau dari kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Tingkat kematangan SPBE terdiri atas 5 (lima) level, dimana masing-masing level menunjukkan karakteristik kematangan tertentu pada kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE.

Penilaian penerapan SPBE didasarkan pada informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui kegiatan penilaian mandiri, penilaian dokumen, dan penilaian interviu melalui proses verifikasi, klarifikasi, dan validasi dokumen pendukung.

Tingkat Kematangan Penerapan SPBE

Tingkat Kematangan Pada Kapabilitas Proses

1. Rintisan	• Pengaturan dalam bentuk konsep yang belum ditetapkan dan Proses tata kelola dilaksanakan secara *ad-hoc*.
2. Terkelola	• Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi sebagian kebutuhan di Instansi Pemerintah serta proses tata kelola dilaksanakan dengan dasar-dasar manajemen terdokumentasi.
3. Terstandar-disasi	• Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi semua kebutuhan di Instansi Pemerintah serta proses tata kelola dilaksanakan sepenuhnya dengan standardisasi.
4. Terintegrasi dan Terukur	• Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi kebutuhan hubungan antar Instansi Pemerintah serta proses tata kelola dilaksanakan dengan pengukuran kinerja secara kuantitatif.
5. Optimum	• Pengaturan telah ditetapkan dan dievaluasi terhadap perubahan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal serta proses tata kelola dilaksanakan dengan peningkatan kualitas.

Tingkat Kematangan Pada Kapabilitas Fungsi Teknis

1. Informasi	• Layanan SPBE dalam bentuk informasi satu arah.
2. Interaksi	• Layanan SPBE dalam bentuk informasi dua arah.
3. Transaksi	• Layanan SPBE dalam bentuk pertukaran informasi dan layanan.
4. Kolaborasi	• Layanan SPBE terintegrasi dengan layanan SPBE lain.
5. Optimalisasi	• Layanan SPBE dapat beradaptasi terhadap perubahan lingkungan internal dan eksternal.

EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2021

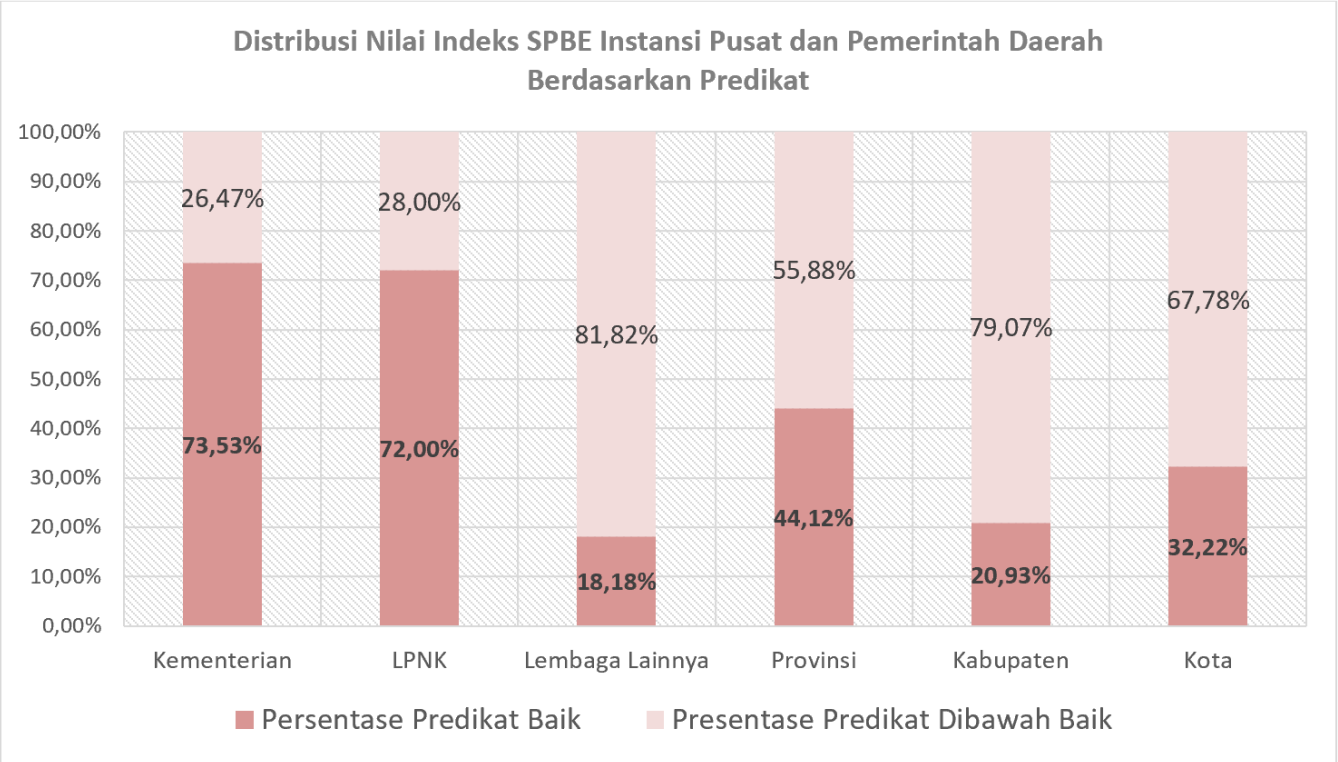
Domain dan Aspek Penilaian	Bobot
Domain 1 - Kebijakan SPBE	**13%**
Aspek 1 - Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	13%
Domain 2 - Tata Kelola SPBE	**25%**
Aspek 2 - Perencanaan Strategis	10%
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	10%
Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE	5%
Domain 3 - Manajemen SPBE	**16,5%**
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE	12%
Aspek 6 - Audit TIK	4,5%
Domain 4 - Layanan SPBE	**45,5%**
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	27,5%
Aspek 8 - Layanan Publik Berbasis Elektronik	18%

Predikat Indeks SPBE

NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT
1	4,2 – 5,0	Memuaskan
2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 – < 3,5	Baik *)
4	1,8 – < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

*) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)

Indeks	Rata-rata nilai						
	Nasional	Kementerian	LPNK	Lembaga Lain	Provinsi	Kabupaten	Kota
SPBE	2,24	2,84	2,77	2,10	2,46	2,11	2,29
Domain Kebijakan	2,21	2,68	2,81	1,89	2,26	2,13	2,23
Kebijakan Internal Terkait Tata Kelola	2,21	2,68	2,81	1,89	2,26	2,13	2,23
Domain Tata Kelola	1,89	2,61	2,56	1,83	2,14	1,73	1,91
Perencanaan Strategis	1,77	2,36	2,47	1,80	1,91	1,62	1,78
Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,00	2,86	2,71	1,86	2,36	1,82	1,99
Penyelenggaraan SPBE	1,93	2,59	2,46	1,82	2,16	1,78	2,02
Domain Manajemen	1,23	1,50	1,39	1,25	1,31	1,17	1,26
Penerapan Manajemen SPBE	1,26	1,53	1,37	1,25	1,35	1,20	1,29
Audit TIK	1,17	1,43	1,44	1,23	1,22	1,11	1,17
Domain Layanan SPBE	2,81	3,49	3,37	2,62	3,10	2,66	2,88
Administrasi Pemerintahan	2,86	3,50	3,48	2,86	3,14	2,71	2,88
Layanan Publik	2,74	3,49	3,21	2,26	3,04	2,59	2,88

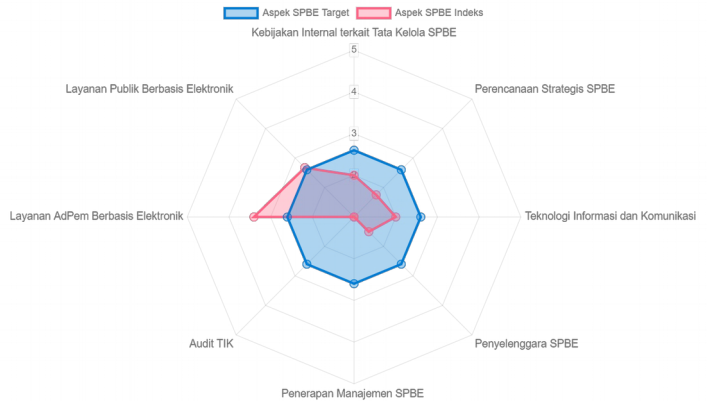


INDEKS SPBE – PEMERINTAH KAB. LUWU

2,29

(Cukup)

Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek



Nama Indeks	Nilai
SPBE	2,29
Domain Kebijakan SPBE	2,00
Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	2,00
Domain Tata Kelola SPBE	1,80
Perencanaan Strategis SPBE	1,75
Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,00
Penyelenggara SPBE	1,50
Domain Manajemen SPBE	1,00
Penerapan Manajemen SPBE	1,00
Audit TIK	1,00
Domain Layanan SPBE	3,11
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,40
Layanan Publik Berbasis Elektronik	2,67

Kekuatan dan Kelemahan

A. Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE sudah dipenuhi oleh Kabupaten Luwu dengan adanya Kebijakan internal yang mendukung penerapan SPBE, Tingkat Kematangan Pembangunan TIK, dan Tingkat Kematangan Layanan SPBE dan Publik

- Kekuatan
  Belum ada indikator pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE yang menjadi kekuatan penerapan SPBE di Kabupaten Luwu. Namun berpotensi menjadi kekuatan pada evaluasi SPBE berikutnya.
- Kelemahan
  Semua indikator pada Aspek Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE di Kabupaten Luwu masih dikatagorikan lemah karena semuanya masih memiliki skor kurang dari 3.

B. Perencanaan Strategis SPBE

Sebagian indikator dari Aspek Perancanaan Strategis SPBE sudah memenuhi penerapan SPBE di Kabupaten Luwu.

- Kekuatan
  Belum ada indikator dari aspek ini yang merupakan kekuatan penerapan SPBE di Kabupaten Luwu. Namun indikator 11 dan 13 dari Aspek Perancanaan Strategis SPBE berpotensi menjadi kekuatan SPBE.
- Kelemahan
  Terdapat tiga indikator yaitu indikator 11, 12 dan 14 dari Aspek Perancanaan Strategis SPBE merupakan kelemahan penerapan SPBE Kabupaten Luwu

C. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Semua indikator pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kabupaten Luwu telah memenuhi penerapan SPBE.

- Kekuatan
  Belum ada indikator pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kabupaten Luwu yang menjadi kekuatan penerapan SPBE.
- Kelemahan
  Semua indikator dari Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kabupaten Luwu merupakan kelemahan penerapan SPBE di Kabupaten Luwu.

D. Penyelenggara SPBE

Indikator 19 dari Aspek Penyelenggara SPBE memenuhi penerapan SPBE di Kabupaten Luwu.

- Kekuatan
  Belum ada indikator dari Aspek Penyelenggara SPBE yang merupakan kekuatan penerapan SPBE di Kabupaten Luwu.
- Kelemahan
  Semua indikator Aspek Penyelenggara SPBE perlu ditingkatkan penerapannya di Kabupaten Luwu.

E. Penerapan Manajemen SPBE

Tidak ada indikator yang memenuhi pelaksanaan Aspek Penerapan Manajemen SPBE di Kabupaten Luwu.

- Kekuatan
  Belum ada kekuatan penerapan SPBE di Kabupaten Luwu dari Aspek Penerapan Manajemen SPBE.
- Kelemahan
  Semua indikator menunjukkan kelemahan penerapan SPBE di Kabupaten Luwu dari Aspek Penerapan Manajemen SPBE.

F. Audit TIK

Belum terpenuhinya penerapan SPBE di Kabupaten Luwu dari Aspek Audit TIK.

- Kekuatan
  Belum ditemukan kekuatan penerapan SPBE di Kabupaten Luwu dari Aspek Audit TIK.
- Kelemahan
  Semua indikator menunjukkan kelemahan penerapan SPBE di Kabupaten Luwu dari Aspek Audit TIK.

G. Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Telah terpenuhinya penerapan SPBE di Kabupaten Luwu dilihat dari Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik.

- Kekuatan
  Indikator 32, 33, 34, 35, dan 40 merupakan kekuatan penerapan SPBE di Kabupaten Luwu dilihat dari Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Kelemahan
  Indikator 41 merupakan kelemahan penerapan SPBE di Kabupaten Luwu dilihat dari Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik.

H. Layanan Publik Berbasis Elektronik

Telah terpenuhinya penerapan SPBE di Kabupaten Luwu dari Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik.

- Kekuatan
  Indikator 42 merupakan kekuatan penerapan SPBE di Kabupaten Luwu dari Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik.
- Kelemahan
  Indikator 43, 44, 47 merupakan kelemahan penerapan SPBE di Kabupaten Luwu dari Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik.

Rekomendasi

Pemenuhan Aspek

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan Layanan Publik Berbasis Elektronik yang sudah dipenuhi oleh Kabupaten Luwu adalah dengan adanya kebijakan internal Arsitektur SPBE, Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE, kebijakan internal Manajemen Data, Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE, Kebijakan Internal Layanan Pusat Data, Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah, Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah, Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi, Kebijakan Internal Audit TIK, Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE, Pembangunan Aplikasi SPBE, Layanan Pusat Data, Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah, Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah, Layanan Perencanaan, Layanan Penganggaran, Layanan Keuangan, Layanan Pengadaaan Barang dan Jasa, Layanan Kepegawaian, Layanan Kearsipan, Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Layanan Pengawasan Internal terkait Pemerintah, Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi, Layanan Kinerja Pegawai, Layanan Pengaduan Pelayanan Publik, Layanan Data Terbuka, Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Layanan Publik Sektoral 1, 2, dan 3.

Unsur Kekuatan

Belum ada Aspek yang menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Kabupaten Luwu.

Unsur Kelemahan

Namun disisi lain, Kabupaten Luwu belum memiliki Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE, Perencanaan Strategis SPBE, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Penyelenggara SPBE, Penerapan Manajemen SPBE, dan Audit TIK dimana tidak ditemukan bukti dukung yang cukup.

Ringkasan

Secara prinsip, dengan adanya implementasi Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan Layanan Publik Berbasis Elektronik akan mendorong peningkatan penerapan SPBE pada Kabupaten Luwu. Adapun dari hasil evaluasi SPBE yang telah dilakukan terhadap Kabupaten Luwu, sudah dapat menggambarkan predikat cukup baik dalam penerapan SPBE, sebagaimana terdapat keunggulan dan kelemahan.

Keunggulan

Keunggulan penerapan SPBE yang dimiliki oleh Kabupaten Luwu adalah pada penerapan Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik. Keunggulan ini terlihat dari dengan adanya Layanan Berbasis Elektronik yang dapat berkolaborasi dengan layanan SPBE lainnya, dan/atau Layanan Perencanaan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lainnya pada bidang Perencanaan, Penganggaran, dan Pengaduan Pelayanan Publik, dengan telah diterapkannya SIPD, dan SP4N LAPOR.

Kelemahan

Namun disisi lain, di Kabupaten Luwu masih terdapat beberapa kelemahan, khususnya pada aspek Penerapan Manajemen SPBE dan aspek Audit TIK. Sebagian besar manajemen SPBE dan audit TIK sudah tertuang dalam bentuk kebijakan tata kelola internal SPBE dengan tingkat kematangan 1 sampai dengan 2, sehingga perlu ditingkatkan dengan mengacu pada pedoman SPBE, dan penerapannya terarah dan tidak terencana. Demikian juga dengan aspek Audit TIK, dimana Kegiatan Audit Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE belum atau telah dilaksanakan tanpa perencanaan yang berkesinambungan, dan atau dilaksanakan tanpa standar / pedoman.

Apresiasi atau Saran Perbaikan

Pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE telah mengatur seluruh perangkat daerah dan dapat ditingkatkan dengan melakukan reviu dan evaluasi secara periodik terhadap semua kebijakan internal tersebut

pada Kabupaten Luwu. Demikian juga pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi dapat ditingkatkan dengan melaksanakan reviu dan evaluasi secara periodik terhadap semua dokumen formal aspek tersebut.

Aspek Penerapan Manajemen SPBE, dan Aspek Audit TIK masih dalam tingkat kematangan terendah dimana Manajemen SPBE dan Audit TIK belum atau telah diterapkan tanpa program kegiatan yang terarah dan terencana pada Kabupaten Luwu. Sehingga pada evaluasi SPBE berikut bisa ditingkatkan dengan penerapan di seluruh perangkat daerah dengan program kegiatan yang terarah dan terencana, sesuai dengan standar dan pedoman SPBE yang berlaku.

Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Aspek Layanan Publik Berbasis ELektronik sudah dilaksanakan dengan baik dengan telah menggunakan aplikasi umum berbagi pakai yang telah ditetapkan secara nasional, atau melakukan replikasi dari layanan-layanan publik sejenis yang dibangun oleh Instansi lainnya pada Kabupaten Luwu. Dengan demikian diharapkan dapat melakukan inisiatif penerapan SPBE keseluruhan sesuai dengan Peraturan yang berlaku, sehingga pada pelaksanaan evaluasi SPBE selanjutnya sudah dapat memenuhi indikator dan kriteria penilaian sesuai target atau melampaui target.

Perolehan Nilai Tingkat Kematangan Indikator

Target nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator adalah 3 (tiga)

No	Indikator	Nilai Tingkat Kematangan
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	2
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	2
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	2
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	2
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	2
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah	2
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi	2
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	2
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	2
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	2
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1
13	Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE	3
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	1
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	2
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	2
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah	2
19	Tingkat Kematangan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	1
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	1
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	1
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	1
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	1
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	1
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	1
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	1
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	1
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	1
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	1
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	1
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	4
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	4
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	4
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	4
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	3
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	3
38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah	3
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	3
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	4
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	2
42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	4
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	2
44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	2
45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	3
46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	3
47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	2